

EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Zulfikar¹, Zulkifli², Zakaria, H.M. Yusuf³, Awaluddin⁴

Universitas Jabal Ghafur

zulfikar@unigha.ac.id¹, zulkifli@unigha.ac.id², zakaria@unigha.ac.id³,
awaluddin@unigha.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja administrasi dan kualitas pelayanan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, prosedur administrasi yang masih birokratis, lemahnya koordinasi antarbidang, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas administrasi publik meliputi kualitas sumber daya manusia, sistem dan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi dan komunikasi internal, serta budaya kerja organisasi. Upaya peningkatan efektivitas administrasi publik dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi dan pengawasan internal, serta pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan kualitas pelayanan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan tata kelola administrasi dan pelayanan pendidikan yang lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci: **Efektivitas Administrasi, Pelayanan Pendidikan, Kinerja Birokrasi**

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of effectiveness of public administration at the Education Office of Pidie Regency, identify the factors influencing it, and formulate strategic efforts to improve administrative performance and the quality of educational services. This research employs a

qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion-drawing techniques. The results indicate that the effectiveness of public administration at the Education Office of Pidie Regency is categorized as moderately effective, but not yet optimal. This condition is reflected in inconsistencies between planning and implementation, bureaucratic administrative procedures, weak inter-departmental coordination, and suboptimal utilization of information technology. The factors influencing the effectiveness of public administration include the quality of human resources, work systems and procedures, utilization of information technology, internal coordination and communication, and organizational work culture. Efforts to enhance the effectiveness of public administration can be carried out through improving the competence of public officials, optimizing the implementation of information technology and the Electronic-Based Government System (SPBE), simplifying administrative procedures, strengthening internal coordination and supervision, and developing a work culture oriented toward performance and service quality. This study is expected to serve as input for local governments in their efforts to improve administrative governance and create more effective and responsive educational services.

Keywords: *Administrative Effectiveness, Educational Services, Bureaucratic Performance, Public Administration*

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berperan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tingkat efektivitas administrasi publik mencerminkan kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam sektor pendidikan, administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pendukung, tetapi juga menjadi faktor strategis yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. Keberhasilan administrasi publik pada dasarnya dapat diukur dari sejauh mana tujuan organisasi mampu direalisasikan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal (Marliani & Si, n.d.)

Seiring dengan bergulirnya era reformasi birokrasi, pemerintah dituntut untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem administrasi publik agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya tuntutan dan ekspektasi masyarakat. (Rizaldy et al., 2024) menegaskan bahwa birokrasi publik perlu bertransformasi dari sekadar pelaksana regulasi menjadi organisasi yang berorientasi pada kinerja dan kualitas pelayanan. Dalam konteks ini, efektivitas administrasi

menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Kondisi ini menuntut organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, untuk memiliki sistem administrasi publik yang efektif, profesional, dan adaptif. Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie memiliki tanggung jawab administratif yang kompleks, meliputi pengelolaan sumber daya manusia pendidikan, perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pendataan satuan pendidikan dan peserta didik, serta pelayanan administrasi kepada tenaga pendidik, satuan pendidikan, dan masyarakat. Kompleksitas tugas tersebut menuntut tata kelola administrasi yang terkoordinasi, berbasis kinerja, dan berorientasi pada pelayanan.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan administrasi publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Permasalahan yang muncul antara lain keterbatasan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, prosedur administrasi yang cenderung birokratis, serta lemahnya koordinasi antarbidang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan, ketidakakuratan data administrasi pendidikan, serta rendahnya tingkat kepuasan pengguna layanan. Selain itu, minimnya mekanisme evaluasi kinerja administrasi secara berkelanjutan turut memengaruhi efektivitas kerja organisasi.

Sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang memiliki dampak strategis terhadap pembangunan daerah dan nasional. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menentukan daya saing suatu daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi pendidikan yang efektif menjadi faktor kunci dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. (Fredy et al., 2019) Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Pendidikan dituntut untuk melakukan pembenahan administrasi secara menyeluruh. Efektivitas administrasi publik menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Rizaldy et al., 2024) menekankan bahwa efektivitas administrasi dipengaruhi oleh kejelasan struktur organisasi, kompetensi aparatur, sistem kerja yang efisien, serta koordinasi antarunit kerja.

Selain itu, (Mendrofa et al., 2025) menyatakan bahwa rendahnya efektivitas administrasi publik sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan, pengawasan, serta budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Pendapat tersebut

diperkuat oleh) yang menegaskan bahwa produktivitas dan efektivitas organisasi publik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sistem manajemen yang diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas administrasi publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja administrasi dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
3. Merumuskan rekomendasi strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi publik dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Pidie.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, termasuk proses, kendala, serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks nyata organisasi pemerintahan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi administrasi publik sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci guna menggali informasi mengenai efektivitas administrasi, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan dapat dilakukan.

2. Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung proses administrasi, pola kerja aparatur, serta mekanisme pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan data dari dokumen resmi seperti struktur organisasi, standar operasional prosedur (SOP), laporan kinerja, peraturan internal, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman dan analisis.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, serta merumuskan rekomendasi strategis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Administrasi Publik Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie

1. Tingkat Efektivitas Administrasi Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan staf administrasi, observasi langsung terhadap proses pelayanan administrasi, serta telaah dokumen perencanaan dan laporan kinerja, dapat disimpulkan bahwa efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun demikian, terdapat sejumlah capaian positif yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dan penguatan tata kelola administrasi di lingkungan instansi tersebut.

Ditinjau dari aspek perencanaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie telah menyusun dokumen perencanaan kerja, seperti rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja tahunan (Renja), yang secara umum telah selaras dengan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perencanaan tersebut mencakup program dan kegiatan yang jelas serta disertai dengan indikator kinerja. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan. Hal ini terlihat dari keterlambatan penyelesaian administrasi tertentu serta belum tercapainya target waktu dalam penyaluran layanan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang telah disusun belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten dan efektif.

Dari aspek pengorganisasian, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie telah terbentuk secara formal dan dilengkapi dengan pembagian tugas, fungsi, dan

kewenangan pada masing-masing bidang dan subbagian. Namun, efektivitas pengorganisasian masih menghadapi beberapa kendala, seperti adanya tumpang tindih tugas antarbidang serta pembagian beban kerja aparatur yang belum merata. Beberapa unit kerja memiliki volume pekerjaan yang cukup tinggi, sementara unit lainnya relatif lebih ringan. Ketidakseimbangan ini berdampak pada kurang optimalnya koordinasi internal dan memperlambat proses penyelesaian administrasi, khususnya dalam pengelolaan data pendidikan dan pelayanan administratif kepada satuan pendidikan.

Pada aspek pelaksanaan, pelayanan administrasi pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih cenderung bersifat birokratis dan belum sepenuhnya berorientasi pada kecepatan serta kemudahan layanan. Proses administrasi masih banyak bergantung pada sistem manual, sehingga memerlukan waktu yang relatif lama dalam penyelesaian dokumen dan pelayanan kepada pengguna layanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi belum dilakukan secara optimal, baik dalam pengelolaan data maupun dalam pemberian layanan administratif. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan, khususnya kepala sekolah dan tenaga pendidik yang membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat.

Sementara itu, dari aspek pengawasan dan evaluasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan dan unit terkait. Namun, pengawasan tersebut belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja administrasi masih lebih banyak berfokus pada pemenuhan laporan formal dan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, temuan-temuan dalam evaluasi belum secara maksimal ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie berada pada kategori cukup efektif. Meskipun telah memiliki perencanaan dan struktur organisasi yang jelas serta pelayanan administrasi yang berjalan, masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, penataan pengorganisasian, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar efektivitas administrasi publik dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Administrasi Publik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, ditemukan bahwa efektivitas administrasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, prosedur dan sistem kerja, koordinasi dan komunikasi antarbidang, serta budaya kerja organisasi.

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor paling dominan dalam memengaruhi efektivitas administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi aparatur masih belum merata, khususnya dalam aspek kompetensi teknis dan administratif. Beberapa aparatur belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi serta sistem administrasi berbasis elektronik yang saat ini menjadi tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Selain itu, keterbatasan program pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur menyebabkan peningkatan kemampuan kerja belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas, ketepatan waktu, dan kualitas hasil kerja administrasi.

2) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie belum dilaksanakan secara maksimal. Meskipun telah tersedia beberapa sistem pendukung administrasi, dalam praktiknya masih banyak proses kerja yang dilakukan secara manual. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ketidakakuratan data, serta rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur teknologi maupun kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut secara optimal.

3) Prosedur dan Sistem Kerja

Prosedur dan sistem kerja yang berlaku juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas administrasi publik. Penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi cenderung panjang, berlapis, dan birokratis sehingga memperlambat proses pelayanan dan pengambilan keputusan. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebenarnya telah disusun dan ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh aparatur. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan SOP menyebabkan terjadinya perbedaan praktik kerja antarbidang.

4) Koordinasi dan Komunikasi Antarbidang

Koordinasi dan komunikasi antarbidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie masih tergolong lemah. Hal ini terlihat dari sering terjadinya keterlambatan dalam penyampaian informasi, pengambilan keputusan, serta penyelesaian urusan administrasi yang melibatkan lebih dari satu unit kerja. Kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif

dan komunikasi yang terstruktur menyebabkan sinergi antarbidang belum terbangun secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan dan pencapaian target kinerja organisasi.

5) Budaya Kerja Organisasi

Budaya kerja organisasi juga turut memengaruhi efektivitas administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja aparatur belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja, hasil, dan peningkatan kualitas pelayanan. Masih terdapat kecenderungan aparatur bekerja secara rutin dan administratif tanpa disertai inovasi, inisiatif perbaikan, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Kondisi ini menghambat upaya peningkatan efektivitas administrasi dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

3. Upaya Peningkatan Efektivitas Administrasi Publik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, ditemukan bahwa efektivitas administrasi publik masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, sistem kerja, maupun dukungan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja administrasi publik secara menyeluruh. Adapun upaya peningkatan efektivitas administrasi publik yang direkomendasikan berdasarkan temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kompetensi Aparatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur masih belum merata, khususnya dalam penguasaan administrasi modern, manajemen kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur menjadi langkah prioritas yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie. Upaya ini dapat ditempuh melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkelanjutan, baik pelatihan teknis administrasi, pelatihan manajemen pelayanan publik, maupun pelatihan penggunaan sistem informasi berbasis digital. Selain itu, diperlukan pula program pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang terencana dan berkelanjutan agar aparatur mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan kerja dan kebijakan publik yang semakin dinamis.

2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, sistem pendataan yang belum terintegrasi, serta rendahnya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi administrasi berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui peningkatan kualitas jaringan dan perangkat teknologi, pengembangan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi, serta digitalisasi layanan administrasi. Dengan optimalisasi teknologi informasi, proses administrasi diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan akurat, sekaligus mampu meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data pendidikan.

3) Penyederhanaan Prosedur Administrasi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prosedur administrasi yang berlaku masih cenderung kompleks dan memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan administrasi pendidikan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur administrasi menjadi upaya penting yang perlu dilakukan. Langkah ini dapat dilakukan melalui peninjauan kembali standar operasional prosedur (SOP) yang ada, dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. SOP yang disederhanakan diharapkan lebih jelas, mudah dipahami, serta mudah diterapkan oleh aparatur, sehingga mampu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, khususnya satuan pendidikan dan masyarakat.

4) Penguatan Koordinasi dan Pengawasan Internal

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan administrasi pendidikan masih belum optimal, yang berdampak pada tumpang tindih tugas dan kurang sinkronnya pelaksanaan program. Oleh karena itu, penguatan koordinasi internal menjadi kebutuhan yang mendesak. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan komunikasi antarbidang, pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin, serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab. Selain itu, fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja administrasi perlu diperkuat melalui penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala. Dengan pengawasan yang efektif, kinerja administrasi dapat dipantau dan diperbaiki secara berkelanjutan.

5) Pengembangan Budaya Kerja Berorientasi Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja aparatur masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan orientasi pada hasil kerja. Oleh karena itu, pengembangan budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada kinerja menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik. Pengembangan budaya kerja ini dapat dilakukan melalui pemberian motivasi kerja, penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif, serta pemberian penghargaan dan sanksi secara adil dan transparan. Dengan terciptanya budaya

kerja yang berorientasi pada kinerja dan kepuasan pengguna layanan, diharapkan aparatur mampu memberikan pelayanan administrasi pendidikan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie berada pada kategori cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, lemahnya koordinasi antarbidang, prosedur administrasi yang birokratis, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas administrasi publik meliputi kualitas sumber daya manusia, sistem dan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi dan komunikasi internal, serta budaya kerja organisasi. Meskipun telah terdapat upaya perbaikan dalam tata kelola administrasi, berbagai kendala tersebut masih berdampak pada kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi pendidikan.

Adapun saran untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, disarankan agar dilakukan peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, optimalisasi penerapan teknologi informasi dan SPBE, serta penyederhanaan prosedur administrasi melalui peninjauan SOP. Selain itu, perlu penguatan koordinasi dan pengawasan internal serta pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan kualitas pelayanan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja administrasi secara menyeluruh dan mendukung terwujudnya pelayanan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fredy, F., Tembang, Y., & Purwanti, R. (2019). *Analisis Kepuasan Orangtua dan Siswa terhadap Kualitas Layanan Pendidikan Dasar*. 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.35724/musjpe.v2i1.1874>
- Marliani, L., & Si, M. (n.d.). *Devinisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang*. 150, 17–21.
- Mendrofa, H. P., Supriadi, B., Yustiari, S. H., & Lubis, A. F. (2025). *Analisis Efektivitas Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia* *Analysis of the Effectiveness of Bureaucratic Reform in Improving the Quality of Public Services in Indonesia*. 8(1), 537–545. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6811>
- Rizaldy, F., Sastra, A., & Purnamaningsih, E. (2024). *Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya* *English Title: Optimization of Bureaucratic Reform on Service Performance of Airlangga Urban Village, Gubeng Subdistrict, Surabaya City*. 2(1), 309–324.

- Fathor, M. (2022). *Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang)
- Fatyandri, A. N., & Muchsinati, E. S. (2025). Pengaruh Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(1), 79-90.
- Fitriyah, A. N., & Arif, L. (2023). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut KOTA SURABAYA. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(3), 772-784.
- Hidayah, A. F. N., Widhiandono, H., Purnadi, P., & Handayani, E. (2024). Pengaruh Beban Kerja, Work Family Conflict Dan Reward Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(4), 1414-1426.
- Humayra, N., & Zulfikar, Z. (2023). Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 2(1).
- Indriastuti. (2020). Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 10, 1–16.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhalisa, R. P., Wulandari, S., & Swasanti, I. (2024). Leadership Mindset Dalam Sumber Daya Manusia Di Era VUCA:(Studi kasus pada pola pikir pemimpin di Kabupaten Bojonegoro). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(2), 423-435.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, N. A., Aneta, A., Kasim, N. M., & Hamim, U. (2025). Reformasi Administrasi Publik: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Lokal Untuk Motivasi Pns Di Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(1), 402-416.
- Thoiba, S. Y., Naway, F. A., & Marhawati, B. (2023). *Efektivitas Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11279-11290.
- Tilaar, H. A. R. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Windriyana, F. A. A., & Alijoyo, F. A. (2024). Proses Manajemen Pendidikan Di Pondok Pesantren Daarudda'wah Kabupaten Tasikmalaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(1), 276-287.
- Wibawa, S. (2017). *Administrasi Publik: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wulandari, S. (2024). Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 4(2), 51–61. <https://doi.org/10.31294/jpr.v4i2.3182>
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.
- Zulfikar, Z., Zulkifli, Z., Jayus, Z., & Awaluddin, A. (2025). Pengaruh Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Indrajaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(3), 1330-1349.